





Dana wakaf yang dikelola merupakan dana publik yang manfaatnya akan disalurkan kembali ke publik. Untuk itu, tidak saja pengelolannya yang harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel.<sup>572</sup> Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf uang, karena harta yang telah diwakafkan wakif akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Penelitian ini difokuskan pada TWI. Sedangkan lembaga filantropi lain hanya sebagai pelengkap data. Dipilihnya TWI sebagai objek penelitian ini, disebabkan TWI merupakan lembaga yang khusus melakukan pengelolaan wakaf, mulai dari penghimpunan, penginvestasikan, dan pendistribusian hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih* tanpa mencampurkan pengelolaan dana wakaf dengan dana zakat. Sehingga tingkat profesionalitas TWI sebagai nazhir wakaf tetap terjaga. Untuk itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian berada sekitar bagaimanakah pengelolaan wakaf uang pada lembaga tersebut? Bagaimana prospek wakaf uang dalam memberdayakan ekonomi umat? Untuk menjawab semua persoalan di atas, penulis mengeksplorasikannya dalam makalah ini dengan judul *Filantropi Islam di Indonesia: Studi Tentang Prospek Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*

## B. Pengelolaan Wakaf dari Tradisional Menuju Profesional

Perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah nusantara. Kebutuhan akan tempat beribadah, seperti masjid, surau, mendorong umat Islam untuk menyerahkan tanahnya sebagai wakaf. Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase. Paling tidak ada tiga fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia<sup>573</sup> yakni,

### 1) Periode Tradisional

Pada fase ini wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah *mahdhah*, yaitu benda-benda wakaf diperuntuk kebanyakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, mushalla, pesantren, tanah pekuburan, dan sebagainya. Pada periode ini keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.<sup>574</sup>

Namun demikian, fungsi wakaf secara khusus sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih kurang dirasakan atau bahkan tidak sama sekali. Selama ini, pemanfaatan wakaf di Indonesia cenderung kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan hanya berpretensi untuk kepentingan kegiatan-kegiatan ibadah

<sup>572</sup>Setiawan Budi Utomo, *Manajemen Efektif Dana Wakaf Produktif*, <http://www.rumahzakat.com>, 15 Januari 2008, 09.59 WIB Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, *Waqaf dan Anggaran Pendidikan Umat*, <http://www.tabungwakaf.com>, Februari 2007, 13.09 WIB

<sup>573</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, Kata Pengantar dalam Ahmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. v-vi

<sup>574</sup>*Ibid.*



*Properties Development Bond*), Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*).<sup>578</sup> Wakaf uang di negara tersebut dapat menggantikan sebagian pajak penghasilan untuk pembangunan infrastruktur, sosial, dan kemanusiaan.

### C. Pengelolaan Wakaf Uang pada Organisasi Filantropi Islam

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara produktif dan profesional yang dikumudangkan undang-undang wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun bidang sosial keagamaan lainnya. Seruan ini mendorong munculnya lembaga pengelola wakaf uang seperti yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika, Baitul Maal Muamalat<sup>579</sup> dengan salah satu produknya Wakaf Tunai Muamalat (Waqtum)-nya dan lembaga-lembaga pengelolaan wakaf, seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).<sup>580</sup> Sesuai dengan pembatasan masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada Tabung Wakaf Indonesia (TWI).

TWI merupakan badan unit atau badan otonom dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa Republika, berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. TWI adalah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf

<sup>578</sup> MA Mannan, *The Institution of Waqf: Its Religious and Socio-Economic Roles and Implications dalam Management and Developmen of Awqaf Properties*, Proceeding of the Seminar, (Jeddah: *Islamic Research and Training Institute, Islamic Developmen Bank*, 1987), h. 36. Lihat juga Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 113

<sup>579</sup> Wakaf Tunai Muamalat (*waqtumu*) pada Baitul Mal Muamalat (BMM) diluncurkan pada saat milad BMI ke 10 tanggal 1 Mei 2002. Strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang dilakukan pada BMM, dilakukan dari nasabah bank Muamalat Indonesia melalui *funding instruction*, yakni perintah pemindah-bukuan dari rekening tabungan dan deposito nasabah BMI yang bersedia mewakafkan pendapatan bagi hasil dana tabungan atau depositonya. Di samping itu, BMM juga melakukan penghimpunan dana wakaf tunai melalui program pemberdayaan. Yakni, seseorang yang mengajukan permohonan bantuan disyaratkan dapat merekrut minimal 5 orang wakif dengan nominalnya minimal Rp100.000,00. Penghimpunan dana wakaf melalui wakaf tunai muamalat pada BMI sudah mulai dilakukan sejak tahun 2002. Dana wakaf tunai di BMM ini diinvestasikan melalui deposito bagi hasil di BMI, dan BPRS. Disamping itu dana wakaf tunai juga diinvestasikan dengan skema bagi hasil pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi syari'ah serta lembaga keuangan lain yang operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah. (Yayan Daryunanti, Manajer Adminstrasi dan Keuangan Baitul Maal Muamalat, Wawancara, Jakarta: 12 Agustus 2009)

<sup>580</sup> Penghimpunan wakaf tunai mulai dilakukan PKPU sejak tahun 2002. Sejak tahun 2002, PKPU sampai saat ini masih dalam proses penghimpunan dana wakaf. Dalam penghimpunan dana wakaf tunai, wakaf tunai yang telah dihimpun di PKPU belum pernah disalurkan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya dana wakaf tunai yang berhasil dihimpun. Harta wakaf yang dikelola oleh PKPU banyak yang berbentuk wakaf properti, seperti sekolah di Aceh, tanah pertanian yang ditanami pohon jati di Lampung, Balai Latihan Kerja tempat kursus menjahit di Bandung, Mobil Ambulan di Ambon, sekarang tanah wakaf di Gandaria sedang dalam proses persiapan untuk pendirian BLK. (Heru Kusnanto Bagian Pendayagunaan PKPU, Wawancara, 21 Juli 2009)

















Manfaat yang dirasakan masyarakat melalui investasi dana wakaf ini cukup besar. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis, maupun dalam bentuk mental spiritual seperti yang dilakukan pada produsen BaksoCip dan Vegemi Idola yang berada di bawah binaan Masyarakat Madani dan pengusaha Bakmi Langgara untuk melakukan usaha dengan cara yang halal.<sup>589</sup> Yang tidak kalah penting adalah pendidikan mental dan moral masyarakat. Di mana masyarakat dalam kelompok usaha dibina untuk mempunyai jiwa *entrepreneurship* dan mencari kehidupan dari cara yang tidak halal, dapat meninggalkan kebiasaan tersebut dengan mencari usaha yang halal.

Di samping itu, sistem penjangkaran kelompok masyarakat yang dilakukan TWI ini, tentu akan lebih memudahkan melakukan monitoring usaha sehingga risiko usaha lebih dapat diminimalisir. Di samping itu sistem penjangkaran kelompok masyarakat seperti ini, manfaat wakaf tentu juga dapat dinikmati oleh banyak orang. Betapa banyak orang miskin yang dapat diberikan bantuan modal dan betapa banyak pula orang miskin yang dapat menikmati hasil usaha dari investasi wakaf uang. Wakaf uang seperti yang diinvestasikan TWI, terbukti memberi kesempatan pada masyarakat untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi mereka. Ini berarti investasi wakaf uang ke sektor ril berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan hidup.

Belajar dari apa yang telah dilakukan di Mesir, negara yang terhitung sukses dalam pengelolaan wakafnya.<sup>590</sup> Kementerian Perwakafan (*Wizarah al Awqaf*) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian,<sup>591</sup> ataupun dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Program investasi wakaf uang ke sektor ril seperti yang dilakukan TWI ini merupakan bentuk pengejawantahan program pengentasan kemiskinan. Menurut Dian Masyita dana wakaf uang dapat diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui *mikro finance* dan pendampingan usaha.<sup>592</sup> Pemberian bantuan dan pendampingan oleh sarjana pendamping yang akan memberikan konsultasi kepada penerima kredit mikro agar dapat pengetahuan cara berusaha dan berbisnis dengan baik. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.

<sup>589</sup> Cahya Saintika, *Bakmi Langgara Surplus Wakaf Tunai Itu Mulai Mengalir*, Republika, 28 Maret 2008

<sup>590</sup> Muhammad Qadr Basa, *Qanûn al-Adl wa al-Inshaf fi al-Qadha' ala Musykilat al-Auqâf*, (Kairo: Dâr as-Salâm, 2006), h. 21. Lihat juga Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: the Islamic World From the Seventh Century to the Present*, h. 42 [www.mcizakca.com/publications.htm](http://www.mcizakca.com/publications.htm), 29 Juli 2009, 15.38 WIB

<sup>591</sup> Ahmad Muhammad Abd al-Azhîm Al-Jamâl, *al-Waqfu al-Islâmî fi at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah al-Mu'ashirah*, Kairo, Dâr as-Salâm, 2007, h. 115

<sup>592</sup> Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan Melalui Wakaf Tunai*, Laporan Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi RI, Jakarta, 2005, h. 35



dan juga Universitas al-Azhar.<sup>596</sup> Singkatnya, pada masa Mamluk, wakaf telah berkembang dengan cukup baik, yang tercermin dari pemanfaatan wakaf untuk kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, dan tanah pemakaman.

### 3) Nazhir Wakaf Profesional

Nazhir adalah faktor kunci keberhasilan lembaga pengelola wakaf. Untuk itu, lembaga pengelola wakaf harus mampu merekrut para nazhir yang amanah dan profesional. Para nazhir dalam bekerja harus meletakkan prinsip-prinsip, amanah, akuntabilitas, transparansi dan inovatif. Di samping itu, sistem operasional lembaga pengelola wakaf juga mesti mengakomodasikan kebutuhan para nazhir. Sehingga para nazhir dapat memberikan karyanya secara maksimal di dalam membangun lembaga pengelola wakaf.

Manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan nazhir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil penelitian CSRC Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menunjukkan bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%).<sup>597</sup> Hasil survei ini menunjukkan, dibandingkan nazhir wakaf perseorangan dalam berbagai aspek ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf.

Seperti yang ditegaskan Habib Ahmed, pengelolaan wakaf dapat menunjukkan pengelolaan wakaf yang lebih efektif bila dilakukan oleh nazhir organisasi nonprofit, dengan status badan hukum yang terpercaya. Menurut peneliti *Islamic Research and Training Institution* (IRTI) ini, keadaan tersebut berbeda dengan pengelola wakaf yang berasal dari pemerintah, walaupun dengan seorang manajer profesional yang dapat membuat inisiatif untuk meningkatkan nilai dan keuntungan wakaf. Namun, mengalami kesulitan untuk membawa perubahan pengembangan wakaf properti, karena diikat oleh birokrasi dan prosedur pemerintahan. Begitu juga nazhir yang berasal dari perorangan, kebanyakan tidak dapat melakukan mengembangkan wakaf dengan baik, karena dikelola oleh nazhir yang tidak kompeten dan profesional. Bahkan banyak kasus

<sup>596</sup> Murat Cizakca, *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From The Seventh Century To The Present*, h. 72, [www.mcizakca.com/publications.htm](http://www.mcizakca.com/publications.htm), 29 Juli 2009, 15.38 WIB

<sup>597</sup> Tuti A Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indoensia*, Jakarta: Center for the Studi of Religion and Culture, 2006, h. 103





Pengembangan wakaf dalam bentuk *real estate* tentu membutuhkan kerja sama dengan lembaga pembiayaan seperti perbankan syari'ah, ataupun dengan developer yang bergelut dalam bisnis ini dengan sistem bagi hasil. *Real estate* yang ada disewakan kepada masyarakat menengah ke atas. Kemudian keuntungannya disalurkan untuk membiayai pembangunan rumah sederhana dengan harga yang murah yang ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Bentuk pengembangan wakaf uang seperti ini akan lebih menjamin tingkat produktivitas harta wakaf karena bisnis yang dijalankan lebih menguntungkan (*provable*) sehingga surplus wakaf dapat dimanfaatkan untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

Di bawah bimbingan *Islamic Development Bank (IDB)*, *Awqaf Properti Investment Fund (APIF)* yang didirikan tahun 2001, telah menyumbangkan modal sebesar 55 milyar dolar Amerika yang datang dari beberapa kementerian wakaf, institusi wakaf dan institusi keuangan Islam termasuk IDB. APIF yang mempunyai misi memobilisasi dana wakaf untuk memajukan dan mengembangkan wakaf properti, membangkitkan kembali kesadaran terhadap sunnah wakaf dan meningkatkan peran IDB terhadap pembangunan sosial ekonomi negara-negara anggota dan warga negara lainnya, bertujuan untuk mengembangkan dan berinvestasi pada wakaf *real estate* yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam, yang secara sosial, ekonomi dan keuangan dapat hidup di negara-negara anggota IDB dan masyarakat Islam di negara-negara bukan anggota. Dalam hal ini IDB berperan sebagai *mudharib* (pengelola) dana yang mempunyai wewenang untuk menahan sumber tambahan dalam bentuk *muqaradhad bonds*, sertifikat *leasing* dan keuangan bersama.<sup>603</sup>

#### 6) Penerapan *Good Corporate Governance*

Realitas menunjukkan sebagian besar lembaga wakaf memakai format yayasan yang memang lebih bernuansa sosial dan nirlaba dari pada komersil. Bila perkembangan pengelolaan wakaf sudah mengarah pada pembentukan entitas-entitas yang lebih bersifat komersial, dapat diberlakukan model akuntansi komersial. Untuk keperluan ini, saatnya lembaga wakaf menerapkan standar akuntansi syari'ah dalam bentuk Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syari'ah seperti yang dilakukan terhadap perbankan syari'ah. Standar akuntansi Islami untuk entitas komersial yang meliputi bentuk usaha jasa, perdagangan dan manufaktur, atau kombinasi ketiganya. Di samping itu, untuk terciptanya *good corporate governace* dalam pengelolaan wakaf uang, lembaga pengelola wakaf harus mempunyai standar operasional.

Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional tetapi juga harus transparan dan akuntabel. Kedua faktor ini harus diwujudkan dalam pengelolaan harta wakaf karena harta yang telah diwakafkan wakif akan berpindah miliknya menjadi milik umat. Dengan adanya pengelolaan secara profesional,

<sup>603</sup> Habib Ahmed, *op.cit.*, h. 129





